

KEKALAHAN KOALISI INDONESIA KERJA (KIK) DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KABUPATEN TANGERANG

Suryani^{1,2,*}, Siti Rahayu¹

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan-Banten 15412, Indonesia

²Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia
Jl. Margonda raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

*Email: yanisueb@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kekalahan KIK dalam mengusung Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 di Kabupaten Tangerang. Ideanya, dengan kekuatan besar partai politik yang tergabung dalam koalisi, juga dengan posisi Ma'ruf Amin sebagai putra daerah asli Kabupaten Tangerang, pasangan Jokowi-Ma'ruf bisa mendapatkan hasil perolehan suara yang besar. Dengan menggunakan teori Partai Politik dan Teori tentang koalisi, penelitian ini menjawab beberapa masalah yang diajukan berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam KIK hingga mengalami kekalahan dalam Pilpres di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa KIK merupakan Koalisi yang sangat dinamis karena diisi oleh banyak parpol peserta pemilu serentak 2019 dengan beragam platform. Hal itu memberikan situasi kerja koalisi yang tidak konsisten dan memunculkan beberapa sebab terjadinya kekalahan dalam pilpres, yaitu: *Pertama*, mekanisme kerja parpol koalisi tidak solid. *Kedua*, perilaku politik masyarakat yang dipengaruhi oleh pilkada DKI Jakarta 2017. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa PDI-P identik dengan PKI. *Keempat*, pembunuhan karakter Jokowi-Ma'ruf. *Kelima*, evaluasi pemilih terhadap kinerja paslon. *Keenam*, telah tertanam wacana anti Jokowi di Kabupaten Tangerang sejak pilkada DKI Jakarta 2017.

Kata Kunci: Koalisi, Dinamika, Kekalahan, Pemilihan Presiden.

ABSTRACT

This research analyzes the defeat of KIK in proposing Jokowi-Ma'ruf in the 2019 presidential election in Tangerang Regency. Ideally, with the large power of political parties that are members of the coalition, as well as with Ma'ruf Amin's position as the native son of Tangerang Regency, the Jokowi-Ma'ruf pair can get large votes. By using the theory of political parties and the theory of coalitions, this research answers some of the problems raised related to the dynamics that occurred in the KIK until it lost in the presidential election in Tangerang Regency. The results of the analysis show that KIK is a very dynamic coalition because it is filled by many political parties participating in the 2019 simultaneous elections on various platforms. This resulted in an inconsistent working situation for the coalition and gave rise to several reasons for the defeat in the presidential election, namely: First, the working mechanism of the coalition political parties was not solid. Second, the political behavior of the people influenced by the 2017 DKI Jakarta elections. Third, there is an assumption that the PDI-P is identical to the PKI. Fourth, the assassination of the Jokowi-Ma'ruf character. Fifth, evaluation of voters on the performance of candidate pairs. Sixth, anti-Jokowi discourse has been embedded in Tangerang Regency since the 2017 DKI Jakarta elections.

Kata kunci: Coalition, Dynamics, Defeat, Presidential Election.

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden dan wakilnya ditahun 2019 menghadirkan atmosfer yang berbeda dari pemilu sebelumnya sebab disandingkan dengan pemilihan calon anggota legislatif dengan tujuan agar menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu. Pemilu presiden tahun 2019 menghadapkan rakyat pada pilihan yang sama pada tahun 2014. Perbedaan hanya terletak pada wakil yang dipilih oleh para calon presiden serta dukungan dari berbagai partai politik yang menjadi kontestan pemilu.

Partai politik menjadi salah satu alat atau kekuatan yang dimiliki kandidat pasangan calon dalam memenangkan pemilu presiden dan legislatif 2019. Partai politik juga merupakan sebuah organisasi yang menjadi perantara besar dalam menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi (Miriam, 2008). Kerja serta kekuatan dari partai politik diharapkan mampu menempatkan calon-calonnya untuk dapat menduduki jabatan-jabatan politik serta merebut kekuasaan politik yang dinilai strategis. Dilain sisi partai politik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik ini bertugas untuk menyampaikan dan menyebarluaskan rencana-rencana serta kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang anggota-anggotanya terorganisir dan mempunyai sebuah orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama (Miriam, 2008). Tentu dalam hal ini partai politik berkesinambungan dan memiliki tujuan besar untuk dapat bisa memenangkan kandidat pasangan calon yang diusungnya baik di tingkat daerah (lokal) maupun pemilihan tingkat nasional. Sebanyak 16 partai politik peserta pemilu 2019 yang masing-masing dari partai tersebut sudah membentuk koalisi untuk mendukung salah satu kandidat pasangan presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden 2019.

Koalisi-koalisi yang terbentuk diharapkan mampu menghantarkan kandidatnya memenangkan pemilihan. Sifat multipartai yang berlangsung di Indonesia menjadi suatu keniscayaan dalam membentuk koalisi. Adanya koalisi akan lebih memperkuat kekuatan politik dalam kontestasi pemilu baik di tingkat lokal maupun nasional. Bangunan dari berbagai aktor-aktor politik yang digabungkan dalam satu wadah kebersamaan dengan tujuan memenangkan kandidatnya. Lebih lanjut Katz dan Mair mengungkapkan bahwasanya tujuan dari partai-partai politik ialah menjaga kepentingan tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan juga platform partai politik tersebut dapat membentuk koalisi guna melanggengkan kepentingan berbagai aktor-aktor politik dalam berkuasa (Katz, Mair, & Widya, 2014).

Jokowi yang maju kembali sebagai petahana lebih memilih mencalonkan diri dengan seorang ulama, salah satu petinggi Nahdlatul Ulama (NU) Organisasi Muslim terbesar di Indonesia serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2019 yaitu Kyai Ma'ruf Amin. Pasangan dengan nomor urut 01 Joko Widodo – Ma'ruf Amin merupakan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nadem, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI, yang diberi nama Koalisi Indonesia Kerja. Pemilu 2019 ini menjadi kesempatan kedua bagi pasangan nomor urut 01 untuk dapat memenangkan kembali hati masyarakat Indonesia terutama di daerah Kabupaten Tangerang, serta menjadi kerja besar bagi para partai politik Koalisi Indonesia Kerja dalam mendulang suara masyarakat Kabupaten Tangerang. Sementara, di pihak lain pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan juga PAN yang diberi nama dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Keberpihakan partai politik yang dibilang cukup besar tentu menjadi peluang besar bagi seorang Jokowi sebagai petahana

dalam memenangkan suara masyarakat Kabupaten Tangerang, serta dorongan dan kerja dari Koalisi Indonesia Kerja yang telah terbentuk guna memenangkan suara pilpres 2019. Disisi lain Kyai Ma'ruf Amin sebagai seorang putra daerah yang berkelahiran asli Kecamatan Kresiek Kabupaten Tangerang menjadi peluang dan harapan besar untuk dapat memenangkan hati masyarakat Kabupaten Tangerang juga dalam Provinsi Banten.

Melihat komposisi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf yang terbentuk dalam Koalisi Indonesia Kerja terbilang mayoritas dan cukup gemuk untuk dapat memenangkan suara pilpres 2019. Basis massa dari partai Koalisi Indonesia Kerja yang terbilang tidak sedikit mendapatkan suara mayoritas, dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tangerang dibandingkan dengan partai Koalisi Indonesia Adil Makmur yang hanya mendapatkan sedikit suara serta kursi pemerintahan di DPRD. Hal ini dapat terlihat dalam tabel perolehan suara sah atau kursi partai politik pemilu legislatif 2019.

Tabel 1. Perolehan Suara Sah/Kursi Anggota Partai Politik Pemilu Legislatif 2019 Kabupaten Tangerang Koalisi 01 Jokowi - Ma'ruf

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	132.039	4 Kursi
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	220.495	8 Kursi
3.	Partai Golongan Karya	208.492	6 Kursi
4.	Partai Persatuan Pembangunan	115.261	6 Kursi
5.	Partai Nasional Demokrat	85.999	2 Kursi
6.	Partai Hanura	45.461	1 Kursi
Jumlah		807.747	27 Kursi

Sumber : Diolah dari data arsip KPUD Kabupaten Tangerang Tahun 2019

Tabel 2. Perolehan Suara Sah/Kursi Anggota Partai Politik Pemilu Legislatif 2019 Kabupaten Tangerang Koalisi 02 Prabowo-Sandi

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Keadilan Sejahtera	146.657	6 Kursi
2.	Partai Amanat Nasional	114.083	4 Kursi
3.	Partai Gerindra	205.839	7 Kursi
Jumlah		625.292	17 Kursi

Sumber : Diolah dari data arsip KPUD Kabupaten Tangerang Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dengan melihat perolehan kursi di DPRD bahwasanya Kabupaten Tangerang masih merupakan basis massa dari Koalisi Indonesia Kerja dengan memperoleh 807.747 suara sah dengan jumlah 27 perolehan kursi dari jumlah total 50 kursi di DPRD Kabupaten Tangerang. Berkaca dari pemilihan umum presiden 2014, para partai Koalisi Indonesia Kerja menjadi sangat yakin serta percaya diri untuk dapat mengantarkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam memenangkan suara masyarakat Kabupaten Tangerang pada pemilihan Presiden 2019. Selain itu, diperkuat dukungan para partai politik yang lebih banyak dibandingkan dengan koalisi Prabowo-Sandi yang mendapat dukungan lebih sedikit dari pada partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Namun menariknya, kenyataan yang terjadi di lapangan berkata lain. Hasil dari perhitungan suara pemilihan umum presiden pasangan Jokowi-Ma'ruf mengalami kekalahan dari pasangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Tangerang, walaupun elektabilitas yang telah banyak dirilis oleh lembaga survei menunjukkan bahwa Jokowi-Ma'ruf jauh lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo-Sandi.

Tabel 3. Hasil Survei LSI Dan Indo Baremeter Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2019

No	Nama Lembaga Survei	Calon Presiden dan Wakil Presiden	
		JK-Ma'ruf	Prabowo-Sandi
1	LSI (Lingkaran Survei Indonesia)	58,7%	30,9%
2	Indo Barometer	59,9%	40,1%

Data di atas merupakan hasil survei untuk mengukur elektabilitas para pasangan calon. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf 58,7% sedangkan pasangan calon nomer urut 02 Prabowo-Sandi 30,9%. Selain itu survei yang dilakukan Indo Barometer selama Februari-April 2019 mengatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf unggul dari pasangan Prabowo-Sandi dengan perolehan hasil survei Jokowi-Ma'ruf 59,9%, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 40,1%.

Selain itu, pasangan 01 diunggulkan dari segi peta kekuatan politik mengingat wakil yang digandeng oleh Jokowi merupakan putra daerah dari Kabupaten Tangerang. Hal ini harusnya menjadi kekuatan yang besar untuk mendapatkan suara yang cukup banyak. Akan tetapi hasil di lapangan mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan perolehan suara sah jauh di bawah pasangan Prabowo-Sandi seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Tangerang

Sumber : Diolah dari data arsip KPUD Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

No	Nama Calon dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	669.423 (38,29%)
2.	H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin uno	1.079.010 (61,71%)
Jumlah		1.748.433 (100%)

Kekalahan Jokowi-Ma'ruf di Kabupaten Tangerang pada pemilihan presiden 2019 menunjukkan bahwa kekuatan akumulasi perolehan suara anggota koalisi sebanyak 807.747 dengan perolehan kursi anggota partai politik sebanyak 27 kursi di DPRD Kabupaten Tangerang dari total 50 kursi, untuk Koalisi Indonesia Kerja tidak menjamin perolehan suara yang banyak. Tentunya hal ini memberikan isyarat bahwa terdapat faktor lain yang mampu mempengaruhi jumlah perolehan suara pada pemilu presiden 2019. Padahal, dengan Koalisi Partai yang solid mampu dengan mudah menggerakkan mesin-mesin partai untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Kampanye yang telah masif dilakukan oleh berbagai partai pendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf menjelang pemilihan presiden 2019. Konsolidasi juga telah dilakukan oleh berbagai partai politik pengusung hingga berbagai relawan seperti kyai, ustad, serta kelompok millennial sampai ibu-ibu rumah tangga.

Setidaknya dengan kekuatan atau figur seorang ulama, kader organisasi besar NU dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2019 yang memiliki daerah kelahiran asli Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang seperti Ma'ruf Amin dan mengingat potensi Jokowi sebagai seorang petahana harusnya mampu mendongkrak suara di Kabupaten Tangerang namun justru kalah di wilayah sendiri hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti atau untuk didalami. Merujuk pada pernyataan sebelumnya sebagai landasan untuk mengalisa kekalahan KIK

dalam pilpres 2019 di Kabupaten Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (Noor, 2011) lebih menekankan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan yang erat antara subjek yang diteliti dengan peneliti. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa pertimbangan, *Pertama*, pertimbangan teoritis. Penelitian ini menggunakan teori koalisi dengan fokus kajiannya dimaksudkan untuk melihat kekalahan Jokowi-Ma'ruf di Kabupaten Tangerang pada pilpres 2019. *Kedua*, pertimbangan praktis, karena penelitian kualitatif ini secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkungannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut baik dalam bahasanya maupun peristilahannya. Dalam tataran operasionalnya, pendekatan kualitatif ini juga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Andrew Heywood (2000), berpendapat koalisi adalah penggabungan dari sekelompok pelaku politik yang terdiri dari partai politik maupun politisi yang berkompetisi secara bersama-sama, dan memiliki persepsi tentang kepentingan dalam menghadapi ancaman bersama serta dalam penggalangan energi kolektif. Hal ini karena partai politik memiliki cita-cita terpisah namun dapat disatukan dalam satu wadah kebersamaan, guna mencapai penguatan kelompok dengan persepsi bahwa tujuan kelompoknya tidak bisa dicapai dengan jalan secara terpisah-pisah. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh berbagai pelaku politik dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai. Terdapat berbagai alasan bagi partai politik dalam melakukan koalisi yang salah satunya sebagai tujuan penguatan (Decky, 2016).

Pada konteks yang berbeda efriza mengemukakan koalisi memiliki dua sifat, pertama *kualisi taktis* dan *kaolisi strategis* berikut penjelasannya (Efriza, 2012):

a. Koalisi Taktis

“Koalisi taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologi dari parpol yang bergabung. Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan dan di tentukan oleh parpol yang lebih besar”.

Terbentuknya koalisi ini karena sangat kentalnya keputusan oligarki elit kekuasaan yang memegang kekuasaan tertinggi partai, dan tidak menutup kemungkinan jika dalam koalisi taktis ini akan cenderung menyampingkan aspirasi konstituen partai dibasis massa. Karena kuatnya dominasi kekuasaan yang dipegang oleh partai politik yang lebih besar. Sigit pamungkas berpendapat bahwas anggota yang dalam hal ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar akan bertindak/mengontrol anggota yang lebih lemah, dan selalu akan berusaha untuk melakukan hal tersebut (Sigit, 2011).

b. Koalisi Strategis

“Koalisi strategis dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi parpol dengan tujuan secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan yang kuat dan tahan lama. Dengan membagi kekuasaan yang adil dan demokratis agar harapan-harapan rakyat terpenuhi”.

Berbeda dengan sifat koalisi taktis, koalisi strategis dibangun lebih kepada atas dasar kepentingan partai politik secara kelembagaan serta keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota koalisi lainnya. Tentang bagaimana pembagian kekuasaan dilakukan atas dasar nilai-nilai politik yang strategis dan pembentukannyapun melalui proses yang terbilang cukup panjang dan sangat hati-hati. Karena yang digantungkan oleh koalisi strategis adalah bukan perihal siapa yang

akan menjadi presiden dan wakilnya, tetapi lebih kepada pemenuhan harapan-harapan rakyat serta kesejahteraan rakyat setelah memegang kekuasaan (Efriza, 2012).

Beberapa pakar berpendapat koalisi secara teori terbentuk atas beberapa asumsi, lebih lanjut seperti yang dikutip oleh Bambang Cipto dari Arend Lijphart membagi teori koalisi kedalam lima bagian, yakni, *minimum winning coalition*, *minimum size coalitions*, *bargaining proposition*, *minimal range coalitions*, dan *minimal connected winning coalitions* (Bambang, 2000).

Minimum Winning Coalition (MWC) ialah koalisi yang memiliki prinsip dengan tujuan memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin guna memperoleh kursi dikabinet serta mengabaikan partai yang tidak perlu. Koalisi jenis ini dibentuk dengan tidak perlu mengindahkan spektrum ideologi partai serta posisi partai politik. Sehingga tak menutup kemungkinan bahwasanya sesuatu dapat mungkin terjadi dalam tubuh koalisi tersebut (Bambang, 2000).

Minimum Size Coalitions (MSC) ialah koalisi dengan partai politik yang memang memiliki suara terbanyak kemudian akan mencari partai yang lebih kecil, hanya sekedar untuk mencapai suara yang lebih mayoritas serta memperkuat posisinya di parlemen dalam pemenuhan (50+1%), yang akan menentukan keberlangsungan pemerintahan. Lain halnya dengan *Bargaining Proposition* atau yang biasa disebut koalisi dengan jumlah partai politik paling sedikit dibandingkan dengan koalisi lainnya. Jenis koalisi *Bargaining Proposition* biasanya proses tawar menawar dalam tubuh koalisi pun relatif mudah dan memudahkan proses negosiasi karena rekanan koalisi yang terbilang paling sedikit. Proses negosiasi serta tawar menawar yang akan berlangsung pada tubuh koalisi ini diharapkan dapat berjalan tanpa gangguan karena koalisi yang terbilang paling sedikit.

Sedangkan, *Minimal Range Coalitions* (MRC) adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis, memudahkan partai dalam berkoalisi membentuk kabinet di pemerintahan. Jenis koalisi ini tidak mudah untuk terbentuk jika partai politik mengabaikan perbedaan arah dan prioritas kebijaksanaan masing-masing partainya (Bambang, 2011).

Koalisi terakhir yaitu *Minimal Connected Winning Coalitions* secara mayoritas teori ini banyak digunakan dalam proses pemilu yang berlangsung di Indonesia. Dasar koalisi ini ialah karena masing-masing dari partai politik memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksanaannya, walaupun kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Koalisi ini tetap memperhatikan dan berpijak pada kesamaan ideologinya (Bakir Ihsan, 2011).

Bentuk Koalisi besar (gemuk) yang dalam proses pembentukannya lebih banyak mengikutsertakan semua partai politik peserta pemilu yang memiliki kesamaan persepsi dan tujuan. Bentuk koalisi besar ini pada prosesnya tak dapat pungkiri banyak partai politik yang masuk kedalam koalisi tersebut agar bisa mencapai dukungan mayoritas di parlemen (Bakir Ihsan, 2011).

Riker dan Michael Laver mengasumsikan bahwa koalisi yang terjadi dalam partai politik didorong oleh keinginan (hasrat) untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang disebut dengan *office seeking* (memaksimalkan kekuasaan) motif dari koalisi tersebut bersifat cair dan tidak permanen (William, Widya, 2016).

Partai politik merupakan salah satu alat atau kekuatan yang dimiliki kandidat pasangan calon dalam memenangkan pemilihan umum presiden dan legislatif. Hal ini karena partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjadi perantara besar dalam menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi (Miriam, 2000). Pendapat lain menjelaskan partai politik merupakan sebuah organisasi

publik yang memiliki tujuan membawa pemimpinnya berkuasa, juga memungkinkan bagi para pendukung politiknya (politisi) agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang mengarah pada dukungan tersebut pada tingkat pemilihan umum (Firmanzah, 2008).

Partai politik memiliki fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program yang disusun bersama dengan berdasar pada ideologi tertentu (Ramlan, 2010). *Pertama*, sosialisasi Politik, ialah partai politik berupaya untuk membentuk sikap dan orientasi politik masyarakat. Melalui beberapa cara masyarakat diperkenalkan dan mendapatkan pemahaman terhadap kegiatan politik yang berlangsung dalam masyarakat baik melalui pendidikan politik maupun indoktrinasi politik (Ramlan, 2010).

Kedua, partisipasi Politik, pada fungsi ini partai politik dituntut untuk bisa mendorong serta mengajak para anggota dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan politik. Partai politik dalam hal ini mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, serta mengajak para anggota partai dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan dalam mempengaruhi proses politik (Ramlan, 2010).

Ketiga, mobilisasi politik, merupakan usaha partai politik untuk memasukan dan mengajak secara cepat sejumlah besar individu yang sebelumnya berada diluar sistem, termasuk dengan mereka yang terbilang apatis, terasingkan, serta tidak tahu menahu, atau tidak tertarik maupun takut, untuk bergabung kedalam sistem. Adanya mobilisasi dan menetapkan tingkat partisipasi, partai politik dapat mengintegrasikan individu tersebut kedalam suatu sistem politik (Ichlasul, 2002).

Perilaku politik adalah sebuah kegiatan yang saling berkaitan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan atas keputusan-

keputusan politik baik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku aktor politik dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut (Ramlan, 2010). Pendekatan atau model sosiologis adalah yang pertama muncul dalam tradisi studi pemilih. Pendekatan sosiologis atau yang dikenal dengan sebutan mazhab columbia ini memiliki asumsi dasar bahwasanya setiap individu memiliki keterikatan dalam berbagai lingkungan sosial (Saiful, 2011). Model ini menjelaskan bahwa sikap masyarakat dalam menentukan pilihannya ketika pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif banyak dipengaruhi oleh prinsip kesamaan sosiologis.

Pendekatan psikologis atau yang dikenal dengan Mazhab Michigan adalah pendekatan yang menjelaskan keputusan suara pemilih yang memilih berdasarkan dengan kedekatan sikap atau perilaku, dan citra pasangan calon. Menurut Saiful Mujani pada pendekatan psikologis seseorang memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pileg maupun pilpres karena individu tersebut tertarik dengan politik dan memiliki rasa, kedekatan pada partai politik tertentu. Pendekatan psikologis memiliki fungsi kepentingan dalam hal memilih kandidat pasangan calon untuk memenuhi kepentingannya secara pribadi, merasa bahwa suaranya cukup berarti dan dapat memperbaiki keadaan/wilayah sekitar (Saiful, 2011).

Teori pendekatan rasional yang pertama kali dipelopori oleh Anthony Downs yang dikutip Emilia dasar teori ini ialah menekankan pada motivasi seseorang dalam memilih atau tidak berdasarkan pada perhitungan mendapatkan keuntungan atau tidak dari keputusan yang telah dipilih oleh individu tersebut. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pilihan seseorang juga didasarkan pada kepentingan pribadi individu dengan mengukur ekonomi-politik. Model pendekatan ini, individu akan senantiasa memilih calon atau partai politik apabila kandidat atau calon partai

tersebut dipandang mampu membantu pemilih dalam memenuhi kepentingan dasarnya atau kehidupan ekonominya. Dengan kata lain pada pendekatan rasional ini seorang individu akan tertarik dengan menghitung bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal dengan ongkos minimal tetapi efektif (*utility maximation*) (Emillia & Wawan, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Kekuatan Koalisi Indonesia Kerja dan strategi pemenangan

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dinamika KIK pada pilpres 2019 di Kabupaten Tangerang serta faktor kekalahan Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres 2019 di Kabupaten Tangerang. Dinamik yang terjadi pada KIK dilihat dari sebaran kekuatan dan strategi pemenangan adalah koalisi yang sangat dinamis karena diisi oleh beragam partai politik peserta pemilu dengan jumlah 9 (sembilan) parpol yang mayoritas mendukung Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019.

Salah satu upaya dalam memenangkan pemilihan serentak tahun 2019 Jokowi turut didukung oleh gabungan partai politik yang cukup terbilang gemuk dalam mengumpulkan kekuatan untuk meraih suara mayoritas baik pada tataran nasional maupun di daerah. Seperti yang dijelaskan oleh H. Kholid Ismail ketua timses Jokowi-Ma'ruf (Kholid, 2020). Menjelaskan bahwa kita adalah koalisi yang paling besar dalam mengumpulkan kekuatan untuk kemenangan.

Disisi lain dari banyaknya partai politik yang tergabung dalam koalisi namun tidak memiliki ikatan kesolidan dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres. Seperti yang dijelaskan oleh Kholid Ismail bahwa banyak dari kader-kader anggota koalisi yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan arahan pusat dalam memaksimalkan kekuatan dalam mendulang suara untuk pasangan Jokowi-

Ma'ruf di pilpres 2019. Banyaknya partai politik yang tergabung tentu menjadi tanggung jawab yang cukup besar bagi KIK untuk mampu menyelaraskan keterampilan berpolitik (berkoalisi) dalam meraih suara. Bukan hanya pada tingkat legislatif namun juga pada tingkat eksekutif dalam hal ini yaitu pemilihan presiden. Juga menjadikan mesin-mesin partai politik anggota koalisi mampu bergerak memenangkan pasangan pilpres baik dalam tataran Nasional maupun daerah.

Sebagaimana yang dikemukakan Efriza dalam Koalisi taktis bahwa partai politik besar yang akan mendominasi kekuasaan (Efriza, 2012). Lebih lanjut Riker menyebut koalisi tersebut dengan *office seeking* bahwa partai politik dalam hal ini membangun koalisi demi memaksimalkan keinginan/hasrat kekuasaan partai politik.

Dengan dominasi koalisi yang terbilang gemuk KIK setidaknya mampu mendapatkan suara mayoritas di Kabupaten Tangerang dengan kekuatan anggota-anggota koalisi yang telah tersebar di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten Tangerang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Miriam, 2000), dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik bahwa partai politik menjadi alat atau kekuatan yang dimiliki oleh pasangan calon untuk memenangkan pemilihan baik ditingkat legislatif maupun presiden.

Beberapa cara yang efektif juga telah banyak dilakukan seperti kampanye secara masif. Melalui beberapa pendekatan dan komunikasi politik yang terbilang cukup masif dilakukan oleh beberapa tim pemenangan maupun para kontestan anggota KIK agar dapat memenangkan pemilihan. Seperti yang telah dijelaskan oleh (Kholid, 2020), berbagai kampanye masif sudah dilakukan dengan melalui jaringan-jaringan muda kaum milenial, ibu-ibu alim ulama karena calon wakil presidennya seorang ulama, juga koordinasi dengan para MUI daerah dan tokoh masyarakat.

Sebaran kekuatan koalisi partai yang cukup gemuk (besar) tetap mengalami kekalahan pada tingkat pilpres. Kekalahan Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tangerang, yang didukung oleh banyaknya partai politik peserta pemilu, menjadi pukulan keras terhadap kader-kader partai politik KIK yang tergabung. Karena menang kalahnya seorang kandidat pasangan salah satunya juga dipengaruhi oleh kemampuan tim sukses anggota koalisi partai politik dalam memenangkan dan memperkenalkan, serta mengajak masyarakat untuk memilih kandidat pasangan Jokowi-Ma'ruf. Hal ini seperti yang dikatakan pangamat politik Leo Agustino. "Kekalahan yang di alami oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya atau kurang optimalnya proses pemenangan tersebut. Ditambah ketidaksolidan tim pemenangan di daerah dalam konsep, proses, maupun implementasi pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf" (Leo, 2020).

Konsekuensi logis dari bentukan atau skema koalisi yang dibentuk dari basis kepentingan yang hanya memaksimalkan kekuatan, atau dalam hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam membangun koalisi. Seperti yang terjadi pada bangunan KIK adalah lemahnya ikatan kesolidan yang terjalin dalam bangunan KIK. Sehingga dalam praktiknya dukungan partai politik anggota koalisi menjadi sesuatu yang seringkali tidak selalu dilakukan dengan maksimal (serius) dalam pemenangan yang kemudian menyebabkan kekalahan pada pemilihan seorang kandidat yang di ajukan.

Kekalahan Pasangan Jokowi-Ma'ruf Pada Pilpres 2019 Di Kabupaten Tangerang.

Faktor Internal: Kinerja partai politik Anggota Koalisi

Koalisi yang dibangun oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf pada pemilu serentak tahun 2019, pada dasarnya memiliki latar

belakang ideologi yang berbeda-beda. Karena terdapat partai dengan ideologi Nasioalis juga ideologi Islam (Religius). Selain bangunan koalisi yang dibentuk pada pilpres Tahun 2019, KIK juga membentuk relawan pendukung Jokowi yang dikenal dengan Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) guna memperkuat kekuatan dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 (Rina, 2019).

KIK yang telah mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019, cenderung pada koalisi dengan prinsip memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin guna memperoleh kursi di kabinet dengan tidak mengindahkan latar belakang ideologi dari masing-masing partai partai politik anggota koalisi. Seperti yang dikemukakan Arendt Lipjhard dalam bukunya Bambang Cipto menjelaskan bahwa partai politik yang dalam hal ini memiliki prinsip dengan tujuan memaksimalkan kekuasaannya sebanyak mungkin agar memperoleh suara mayoritas atau yang disebut dengan *Minimum Winning Coalition* (MWC) (Bambang, 2000).

KIK yang diisi oleh mayoritas partai politik peserta pemilu tahun 2019, dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama pada tiap-tiap pertemuan tidak selalu sejalan dengan yang disepakati. Pada praktiknya banyak dari kader-kader anggota partai koalisi yang tidak menjalankan kebijakan tersebut, berada diluar kesepakatan, hal tersebut juga di jelaskan langsung oleh H. Kholid Ismail, "Golkar aja banyak dari kadernya yang tidak mendukung, Golkar itu di pusatnya mendukung kita, tapi di lapangan banyak dari kader-kader golkar yang memang di luar dari kebijakan itu" (Kholid, 2020).

Selain itu, pemenangan yang dilakukan oleh KIK juga tidak maksimal dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, seperti yang diungkapkan oleh Leo Agustino: "Jadi apakah Koalisi Indonesia Kerja itu maksimal dalam memenangkan pasangannya, menurut saya tidak, karena

tim koalisi pasangan Jokowi-Ma'ruf kurang serius "menggarap" pemenangan pasangannya. Mereka "terlalu sibuk" dengan urusan pribadi. Hal ini disebabkan oleh pemilihan serentak yang menyebabkan keterbelahan prioritas dari para anggota koalisi partai politik " (Leo, 2020).

Partai politik anggota koalisi yang dalam hal ini menjadi mesin pemenangan sangat berpengaruh dalam perolehan suara pasangan yang diusungnya. Merujuk pada fungsi partai politik dalam hal ini tentu menjadi sebuah komitmen yang harus di jalankan seperti, sosialisasi, partisipasi serta mobilisasi. Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Kholid Ismail, secara faktual tim pemenangan dari partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja pasangan Jokowi-Ma'ruf di Kabupaten Tangerang tampak kurang serius menggarap pemenangan pasangan yang di ajukan.

Partai politik anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf memiliki banyak kader-kader partai politik yang tidak sejalan dengan komitmen pemenangan pasangan yang di usungnya. Kesepakatan yang kemudian telah di buat dalam rapat-rapat rutin saat melakukan koalisi tetap tak menjadi pedoman saat melakukan kampanye dilapangan untuk memperoleh suara mayoritas pada pemilihan presiden (Kholid, 2020).

Kebijakan untuk berpihak dalam koalisi tertentu bersama partai politik lain. Dikeluarkan sepihak oleh DPP yang harus diikuti oleh DPD dan DPC, hal tersebut membuat kader-kader parpol menjadi pasif dalam upaya-upaya pemenangan bagi pasangan presidennya. Tak hanya menjadikan beberapa anggota partai politik menjadi pasif. Di lain sisi, karena pileg dan pilpres yang di lakukan secara berbarengan menyebabkan terpecahnya konsentrasi tim pemenangan partai politik dengan tim pemenangan pasangan calon presiden.

Sehingga tidak bisa memenuhi tiga fungsi partai politik seperti yang dikemukakan oleh Ichlasul Amal yang menyebutkan bahwa setidaknya partai

politik harus melakukan sosialisasi politik, partisipasi politik, dan mobilisasi politik. Karena andai tiga fungsi tersebut terpenuhi dengan baik. Organ-organ pemenangan dalam pilpres maupun pileg pada pemilihan tahun 2019, bisa dipastikan akan berjalan juga dengan baik.

Karena banyak nya anggota kader-kader partai politik yang dalam praktiknya tidak menjalankan ketentuan dari ketua (leader) anggota koalisi, maka kemenangan seperti menjadi sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Seperti yang dijelaskan oleh H.Kholid Ismail, ada tidaknya koalisi tergantung kebijakan ketua umum berdasarkan hirarki. Adapun yang dibawah hanya mengikuti instruksi DPP (Kholid, 2020).

Partai politik anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf memiliki banyak kader-kader partai politik yang tidak sejalan dengan komitmen pemenangan pasangan yang di usungnya. Kesepakatan yang kemudian telah di buat dalam rapat-rapat rutin saat melakukan koalisi tetap tak menjadi pedoman saat melakukan kampanye dilapangan untuk memperoleh suara mayoritas pada pemilihan presiden (Kholid, 2020). Pasangan Jokowi-Ma'ruf yang didukung oleh sembilan partai politik peserta pemilu yang mendapatkan total 27 kursi di DPRD Kabupaten Tangerang dari total 50 kursi. Tidak seimbang dengan perolehan suara pada pemilihan presidennya yang hanya memperoleh suara 669.423 (38%).

Ketidakseimbang perolehan suara antara pileg dengan pilpres, hal tersebut salah satunya disebabkan karena partai politik anggota yang tergabung dalam satu wadah tersebut, tidak sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah disepakati bersama partai politik lain. Serta tampak tidak serius dalam menggalang suara untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf, disisilain tidak adanya tingat kesolidan dalam memenangkan pasangan yang di usungnya.

Faktor Eksternal: Perilaku Politik Masyarakat

Faktor kekalahan seorang kandidat dalam pemilihan tidak hanya diidentifikasi dari kinerja partai politik anggota koalisi (tim pemenang) yang telah tergabung. Guna mengidentifikasi faktor lain dari kinerja koalisi maka aspek lain juga perlu dihubungkan untuk mengaitkan satu dengan yang lainnya. Perilaku politik masyarakat yang terjadi di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh beberapa faktor di antara seperti:

Pengaruh Pilkada DKI Jakarta

Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada tahun 2017 cukup menyita perhatian publik. Kontestasi yang terjadi antara Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sorotan berita Nasional. Masing-masing kandidat yang diusung oleh partai politik tersebut berlomba untuk mendapatkan hati masyarakat dengan tujuan agar dipilih pada pemilihan gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Pasalnya pesta demokrasi yang terjadi setiap lima tahun sekali tersebut, tak hanya diwarnai oleh kampanye masif para kandidat dalam memenangkan pemilihan. Disisi lain politik Identitas juga kerap mewarnai jalannya pilkada DKI tersebut.

Politik identitas atau isu SARA yang kerap mewarnai jalannya pesta demokrasi pemilihan pilkada DKI Jakarta tahun 2017, merembes pada pemilihan pilpres 2019, atas kekalahan yang dialami oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf. Hal ini juga disampaikan oleh Leo Agustino, "Kekalahan pasangan Jokowi-Ma'ruf, merujuk pada pengalaman saya di lapangan, disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena faktor legasi Pilkada 2017 saat itu, antara pak Anies dan pak Basuki (Ahok), yang pada akhirnya ini berimbas sampai pada pilpres 2019" (Leo, 2020).

Isu yang semakin hangat pada pilkada Jakarta di putaran kedua tersebut, atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang

pada saat itu didampingi wakilnya Djarot Saiful Hidayat. Membuat politik identitas semakin kentara dikalangan masyarakat Jakarta. Hal ini menimbulkan pro kontra ditengah pilkada yang sedang berlangsung. Kandidat yang diusung oleh partai besar PDI Perjuangan tersebut, diduga telah menistakan agama atas surah Al-Maidah ayat 51 yang sempat ia singgung beberapa kali pada saat kampanye di kepulauan seribu DKI Jakarta. Kasus penistaan agama dan dianggap menghina ulama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak hanya menyedot perhatian masyarakat DKI Jakarta yang tengah merayakan pilkada. Di lain sisi, sebagian besar kasus tersebut menyita perhatian masyarakat Indonesia hingga bermuara pada aksi. Hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada saat itu diketuai oleh Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI menyebutkan bahwa ucapan Basuki Tjahaja Purnama memiliki konsekuensi hukum, dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indah, 2018).

Kolega Teman Rapat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sempat menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2014 mendampingi Joko Widodo. Tak hanya pernah menyandang status menjadi wakil Gubernur dari pak Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sama-sama sempat diusung dari partai pengusung Jokowi pada pilpres 2019 yaitu PDI Perjuangan.

Sempat menjadi partner dalam 2 Tahun kepemimpinan politik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2014. Jokowi yang maju kembali pada pilpres 2019 dengan didampingi Kyai Ma'ruf Amin menjadi perhatian serius dikalangan pemilih. Pasalnya selain menyandang status sebagai calon petahana pada pilpres 2019, Jokowi juga direpresentasikan sebagai teman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Karena kepemimpinan 2 (Dua) Tahun menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menyandang status sebagai partner politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada pilkada 2017 sempat membuat beberapa kalangan marah. Hal ini disebabkan karena kasus penistaan Agama yang sempat dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pilkada 2017. Kemarahan masyarakat pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga merembes pada Jokowi pada pilres 2019, karena dinilai sebagai teman (kolega) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain kemarahan atas Basuki yang merembes pada kontestasi politik 2019, pada reuni aksi 212 banyak dari sejumlah tokoh yang menggunakan kesempatan atas acara tersebut untuk mengkritik para penguasa yang tengah menjabat pada periode 2014-2019 (Adhi, 2018).

Hal ini juga di sampaikan oleh Leo Agustino, “karena legasi pilkada 2017 kemarin itu, Basuki direpresentasikan sebagai teman rapat Jokowi, sehingga kemarahan masyarakat pada Basuki juga berimbas pada pasangan Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019, Kemudian adanya anggapan bahwa PDI Perjuangan identik dengan PKI” (Leo, 2020). Dengan demikian, bahwa indikator yang ada pada pendekatan psikologis seperti persepsi dan penilaian kepada kandidat, isu atau tema serta citra kandidatnya terlihat pada masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Pendekatan psikologis menekankan bahwa identifikasi pilihan seseorang terhadap kandidat tertentu berdasarkan pada persepsi dan pilihan kepada kandidat, isu atau tema serta citra dari seorang kandidatnya. Artinya bahwa selain kedekatan pemilih dengan partai dalam mempengaruhi pilihan seorang pemilih, maka figur dari seorang kandidat (calon) juga menentukan pilihan seorang pemilih dalam menjatuhkan pilihannya (Haryanto, 2014).

Lebih lanjut Leo Agustino mengatakan bahwa sejak pilkada 2017 antara Anis Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wilayah Kabupaten Tangerang telah menjadi wilayah tradisi anti-jokowi. Karena representasi pertemanan tersebut sentimen terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf semakin kentara pada pilpres 2019. Akibatnya masyarakat semakin tidak suka dengan sosok pasangan Jokowi-Ma’ruf. Di sisi lain pembunuhan karakter yang dilakukan dengan pelbagai macam cara dan metode, baik di media sosial, media cetak, yang secara langsung termasuk didalamnya hoaks. Hal ini membuat sosok pasangan Jokowi semakin tidak banyak disukai masyarakat Kabupaten Tangerang (Leo, 2020). Selain itu dengan sebaran kandidat anggota DPRD dari KIK, tidak mampu menetralsir persepsi dan tradisi anti-Jokowi di wilayah Kabupaten Tangerang.

Jokowi yang didampingi oleh seorang ulama putra daerah dari Kabupaten Tangerang pada kontestasi pilpres 2019 justru mengalami kekalahan pada daerah tersebut. Ketua Majelis Ulama Indonesia ke-7 Kyai Ma’ruf Amin tetap tidak mampu mendapatkan suara dari mayoritas masyarakat Kabupaten Tangerang pada pemilihan presiden 2019. Figur seorang ulama juga tidak menjadi jaminan bagi para ulama untuk lebih memilihnya.

Status Ma’ruf Amin sebagai putra daerah setidaknya menjadi kekuatan tambahan dalam memenangkan suara mayoritas dengan membangun koordinasi antara partai politik dengan MUI di daerah dalam memenangkan pemilihan presiden. Namun, dalam hal ini MUI daerah berdiri tegak pada porsinya dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Hal ini disampaikan oleh ketua umum MUI Kabupaten Tangerang Bapak Kyai H. Uwes Nawawi, ”Jadi MUI sebagai wadah berkumpulnya ulama, cendekiawan itu adalah organisasi yang independen, terkait dengan pilpres atau pileg maka MUI berdiri tegak pada porsinya, tidak menjadi

underbow dari partai politik dan lain sebagainya, karenanya tidak ada yang disebut apa itu koordinasi apa itu pengarahan baik secara struktural dari pusat sampai kedaerah, ataupun sesama MUI jadi tidak ada. Jadi itu pyur urusan politik yah politik, urusan organisasi-organisasi, jadi organisasi MUI tidak terlibat di dalamnya terkait dengan dukung mendukung yah, kalau mensukseskan tentu ikut mensukseskan apa artinya, artinya dengan ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya ikut memilih, adapun pilihannya siapa itu tergantung dengan masyarakat. Jadi secara organisasi tidak ada pengarahan tidak ada konsolidasi, tidak ada penggalangan untuk mendukung salah satu pasangan calon, kalau untuk mensukseskan pesta demokrasinya sendiri yah tentu kita punya kewajiban yang sama dalam mensosialisasikan, memasyarakatkan agar masyarakat pada waktunya memilih dan memakai hak-hak nya dalam memilih” (Uwes, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas dalam hal ini independensi Anggota MUI daerah Kabupaten Tangerang terlihat jelas dengan berdiri pada porsinya sebagai organisasi yang independen. Tidak memilih terikat dengan partai politik dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019. Dalam hal ini pendekatan sosiologis tidak menjadi alasan utama bagi pilihan seseorang untuk memilih kandidat berdasarkan agama. Pada pendekatan rasional pilihan seseorang ditentukan dengan mengukur ekonomi-politik. Pendekatan ini menjelaskan individu akan senantiasa melihat calon atau partai politik yang dipandang mampu membantu pemilih memenuhi kebutuhan dasarnya, atau memajukan daerahnya. Saiful Mujani dkk berpendapat pada pendekatan rasional seorang pemilih berasumsi, bahwa pillihan politik pemilih sedikitnya dibentuk dari evaluasi atas kondisinya baik itu secara personal maupun kolektif. Evaluasi positif individu terhadap kondisi ekonomi akan memberikan *reward* (ganjaran)

terhadap pejabat yang sedang menjabat. Namun, justru sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan seorang individu negatif (tidak baik), maka individu tersebut akan memberikan hukuman terhadap pejabat tersebut dengan tidak memilihnya kembali atau lebih memilih pihak oposisi (Saiful, 2011).

Berdasarkan keterangan Kyai H. Mambri dengan pendekatan rasional peneliti berpendapat bahwa, kemajuan ekonomi pada periode kepemimpinan Jokowi 2015-2019 juga sangat diperhatikan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Sebagai pertimbangan agar dapat memilih kembali atau tidak pasangan Jokowi-Ma’ruf pada pemilihan presiden Tahun 2019. Baik itu kemajuan ekonomi yang dirasakan secara personal maupun kemajuan ekonomi berdasarkan wilayah/daerah maupun nasional.

Dari keterangan seorang ulama yang dalam hal ini lebih memilih untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Menunjukkan bahwa status Ma’ruf Amin sebagai seorang ulama putra daerah Kabupaten Tangerang tidak menjadi kekuatan agar masyarakat lebih memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf. Terdapat alasan lain yang menjadi acuan pemilih tersebut lebih memilih kandidat lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh ketua umum MUI Kabupaten Tangerang. Dimana pilihan ulama terhadap pilpres dan pileg berdasarkan pada banyak pertimbangan bukan hanya berkaitan dengan sentimen agama dan kedekatan (Uwes, 2020).

Dengan menggandeng sosok seorang ulama yang diharapkan mampu mendongkrak suara pemilih di Kabupaten Tangerang. Sehingga Jokowi-Ma’ruf dalam hal ini mampu mengalahkan pasangan lawan politiknya ternyata gagal. Pasangan Jokowi-Ma’ruf tetap berada di bawah pasangan Prabowo-Sandi dengan perolehan suara sah sebanyak 669.423 (38,29%) Jokowi Ma’ruf, 1.079.010 (61,71%) Prabowo-Sandi.

Dengan melihat hasil perolehan suara pada pilpres 2019 peneliti beranggapan bahwa dalam hal ini Tim Pemenangan Daerah (TKD) gagal dalam meyakinkan masyarakat untuk tidak percaya dengan berita/Isu kedekatan Jokowi dengan Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu isu PDI Perjuangan dekat dengan PKI, termasuk pembunuhan karakter dengan berbagai macam cara termasuk hoaks yang tengah beredar ditengah masyarakat Kabupaten Tangerang juga gagal dinetralisir oleh tim pemenangan dan anggota KIK. Karena mekanisme kerja yang tidak beraturan dalam menggalang suara untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Pengamat Politik (Leo, 2020) , “Saya melihat konsep dan implementasi yang ditawarkan tidak menarik. Juga kontra-narasi terhadap pembunuhan karakter Jokowi-Ma'ruf tidak dipersiapkan secara matang oleh tim pemenangan daerah”. Karena gagalnya konsep serta implementasi yang dikampanyekan oleh tim pemenangan daerah dalam merebut perhatian serta suara masyarakat Kabupaten Tangerang. Isu atau berita yang tengah terjadi ditengah masyarakat juga mempengaruhi sebagian besar pilihan masyarakat yang gagal diperbaiki oleh tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Lebih lanjut Ferdinand Eskol mengatakan dalam hasil penelitiannya, pada pilpres tahun 2019 diwarnai dengan berbagai ujaran kebencian, berita hoax dimedia sosial yang cukup sulit untuk dikendalikan. Pasangan Jokowi-Ma'ruf menjadi kandidat yang lebih banyak terpapar oleh berita bohong serta ujaran kebencian dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-empiris Ferdinand Eskol mengatakan dari tiga platform media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram terhadap kampanye negatif yang terjadi pada pilpres 2019, yang menerpa masing-masing pasangan calon presiden. Tampak jelas bahwa isu politik identitas

dan agama menjadi salah satu yang paling terbesar dan menjadi *top of mind* ditengah masyarakat. Pasangan Jokowi-Ma'ruf menjadi pasangan utama yang terkena dampak isu politik identitas dan juga agama. Eskol menjelaskan data dari Indonesia Indicator menyebutkan, dari jumlah ujaran kebencian dan hoax yang menyerang Jokowi dimedia sosial seperti twitter hingga mencapai sekitar 23% berhubungan dengan isu agama. Begitu juga yang terjadi dimedia sosial lain seperti facebook (Ferdinand & Tiar, 2019).

Status Ma'ruf Amin sebagai putra daerah yang beberapa kali menonjolkan identitasnya kedaerahannya dalam media sosial berita online maupun televisi, tidak menjadi kekuatan dan tidak mampu mengubah suara mayoritas masyarakat Kabupaten Tangerang maupun Banten. Perolehan kursi Koalisi Indonesia Kerja yang terbilang cukup banyak, karena melebihi setengah dari total 50 kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Tangerang juga tidak menjadi kekuatan pada pemilihan presiden pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf tetap mengalami kekalahan di Kabupaten Tangerang. Hal ini merupakan fenomena unik karena kandidat dari PDI Perjuangan juga seorang petahana yakni Joko Widodo yang memiliki potensi besar dan diharapkan memenangkan kontestasi kembali yang memiliki wakil seorang ulama besar, ketua MUI dan juga merupakan putra daerah asli Kabupaten Tangerang, justru kalah dilingkungan sendiri. Selain itu, gabungan partai yang menjadi anggota KIK secara akumulatif menguasai DPRD Kabupaten Tangerang dengan perolehan 27 kursi.

Terlepas dari kegagalan tim pemenangan daerah karena mekanisme kerja yang tidak beraturan serta mesin partai politik yang bekerja tidak maksimal dalam mendukung dan memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Figur seorang kandidat juga menentukan kemenangan dalam kontestasi politik. Kelemahan ini yang

kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam mengumpulkan dukungan masyarakat Kabupaten Tangerang. Secara kekuatan dan militansi KIK yang dibangun untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf kalah dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang dibangun oleh partai Gerindra bersama dengan partai PKS dan PAN berhasil mengumpulkan suara 61,71% untuk pasangan Prabowo-Sandi.

KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian yang peneliti peroleh, dinamika yang terjadi dalam Koalisi Indonesia Kerja adalah koalisi yang amat sangat dinamis karena diisi oleh banyak partai politik. Serta mempunyai beragam agenda-agenda politik dalam upaya memenangkan pemilihan serentak Tahun 2019 antara pileg dan pilpres. Dengan kekuatan gabungan partai politik yang amat sangat besar. Tidak cukup dengan hanya gabungan partai politik peserta pemilu dalam mengumpulkan kekuatan untuk memenangkan pemilihan presiden. KIK juga membentuk Aliansi Relawan Jokowi (ARJ), kekuatan dari berbagai calon anggota DPRD KIK di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Kampanye masif yang dilakukan dengan menggunakan jaringan-jaringan muda kaum Millinial, Ibu-ibu serta para ulama daerah dengan menggandeng seorang ulama kader organisasi besar Nahdlatul Ulama, putra daerah asli Kabupaten Tangerang Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden dari Joko Widodo.

Di lain sisi, motif koalisi yang dibentuk termasuk dalam *Office Seeking* atau MWC dimana koalisi yang terdiri dari sembilan partai politik tersebut hanya untuk memaksimalkan kekuasaan atau sekedar membentuk kekuatan mayoritas untuk kepentingan-kepentingan pragmatis. Secara faktual Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Kabupaten Tangerang tampak kurang serius menggarap pemenangan pasangan yang di ajukan. Hal ini disebabkan karena salah

satunya terpecahnya konsentrasi tim pemenangan partai dengan tim pemenangan calon presiden. Karena Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara berbarengan. Bangunan KIK gagal dalam membendung isu anti Jokowi di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang sehingga hal tersebut berdampak terhadap kepercayaan masyarakat untuk tidak memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan presiden Tahun 2019.

Koalisi Indonesia Kerja yang terdiri dari sembilan partai politik seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, PSI, Perindo, PKPI, Hanura, tidak mampu memberikan kemenangan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya :

Pertama, kegagalan tim pemenangan karena mekanisme kinerja partai politik anggota koalisi yang tidak beraturan (tidak solid). *Kedua*, pengaruh pilkada DKI Jakarta serta faktor legasi Pilkada 2017 antara Anies dan Ahok, Ahok yang direpresentasikan sebagai kolega rapat Jokowi sehingga kemarahan pada ahok juga merembes pada pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa PDI Perjuangan identik dengan PKI. *Keempat*, pembunuhan karakter pada Jokowi-Ma'ruf dengan berbagai macam cara dan metode termasuk di dalamnya hoaks. *Kelima*, hasil evaluasi masyarakat terhadap pasangan calon. *Keenam*, Kabupaten Tangerang sejak pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Jakarta telah menjadi wilayah tradisi anti Jokowi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 2002. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Bambang. 2000. *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Efriza. 2012. *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heywood, Andrew. 2000. *Key Concept in Politics*, Palgrave Study Guides.
- Mujani, Saiful. R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi. 2011. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Mizan Publika.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Indonesia, Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism.
- Subagyo, Firman. 2009. *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: RMBooks.
- Subakti, Ramlan. 2012. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- 2010.
- Harvey, Welliam. “Kekalahan Partai Koalisi Merah Putih Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2011.
- KPUD. “Laporan Hasil Pemilihan Serentak Kabupaten Tangerang Tahun 2019”.